



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020;
- b. bahwa dengan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

## RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>1</b>	<b>GUBERNUR ACEH</b>	<b>ACEH</b>	<b>1.112.627.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	854.233.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	258.394.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>2</b>	<b>GUBERNUR SUMATERA UTARA</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>974.095.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	686.669.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	287.426.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>3</b>	<b>GUBERNUR SUMATERA BARAT</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>1.101.550.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	837.609.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	263.941.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>4</b>	<b>GUBERNUR RIAU</b>	<b>RIAU</b>	<b>900.099.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	639.597.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	260.502.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>5</b>	<b>GUBERNUR KEPULAUAN RIAU</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>864.281.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	643.429.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	220.852.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>6</b>	<b>GUBERNUR BENGKULU</b>	<b>BENGKULU</b>	<b>868.588.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	631.997.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	236.591.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>7</b>	<b>GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>1.034.776.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	797.834.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	236.942.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>8</b>	<b>GUBERNUR JAMBI</b>	<b>JAMBI</b>	<b>907.038.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	649.868.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	257.170.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>9</b>	<b>GUBERNUR SUMATERA SELATAN</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>1.001.312.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	719.400.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	281.912.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>10</b>	<b>GUBERNUR LAMPUNG</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>840.898.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	629.449.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	211.449.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>11</b>	<b>GUBERNUR DKI JAKARTA</b>	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>593.625.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	354.818.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	238.807.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>12</b>	<b>GUBERNUR BANTEN</b>	<b>BANTEN</b>	<b>766.250.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	541.204.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	225.046.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>13</b>	<b>GUBERNUR JAWA BARAT</b>	<b>JAWA BARAT</b>	<b>874.096.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	656.921.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	217.175.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>14</b>	<b>GUBERNUR JAWA TENGAH</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>966.316.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	723.049.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	243.267.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>15</b>	<b>GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA</b>	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>	<b>945.607.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	716.797.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	228.810.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>16</b>	<b>GUBERNUR JAWA TIMUR</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>3.535.788.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	712.029.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	2.823.759.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FTA CENTER DAERAH	
<b>17</b>	<b>GUBERNUR BALI</b>	<b>BALI</b>	<b>992.341.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	706.101.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	286.240.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>18</b>	<b>GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>840.831.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	584.049.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	256.782.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>19</b>	<b>GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>888.767.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	619.665.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	269.102.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>20</b>	<b>GUBERNUR GORONTALO</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>985.865.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	700.997.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	284.868.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>21</b>	<b>GUBERNUR KALIMANTAN BARAT</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>973.261.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	688.985.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	284.276.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>22</b>	<b>GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>819.992.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	570.105.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	249.887.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>23</b>	<b>GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>899.210.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	632.961.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	266.249.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>24</b>	<b>GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>945.875.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	700.069.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	245.806.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>25</b>	<b>GUBERNUR KALIMANTAN UTARA</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>907.199.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	589.025.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	318.174.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>26</b>	<b>GUBERNUR SULAWESI BARAT</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>950.351.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	653.753.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	296.598.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>27</b>	<b>GUBERNUR SULAWESI UTARA</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>934.799.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	644.225.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	290.574.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>28</b>	<b>GUBERNUR SULAWESI TENGAH</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>962.563.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	673.659.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	288.904.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>29</b>	<b>GUBERNUR SULAWESI SELATAN</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>1.006.813.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	708.257.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	298.556.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>30</b>	<b>GUBERNUR SULAWESI TENGGARA</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>1.012.389.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	725.877.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	286.512.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>31</b>	<b>GUBERNUR MALUKU</b>	<b>MALUKU</b>	<b>1.075.809.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	733.525.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	342.284.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>32</b>	<b>GUBERNUR MALUKU UTARA</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>1.038.683.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	725.757.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	312.926.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
<b>33</b>	<b>GUBERNUR PAPUA</b>	<b>PAPUA</b>	<b>1.127.942.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	752.001.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	375.941.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
<b>34</b>	<b>GUBERNUR PAPUA BARAT</b>	<b>PAPUA BARAT</b>	<b>1.073.585.000</b>
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	744.533.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	329.052.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI

